



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUNRAT KASMIRI
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
3. NHK : 134413

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.292.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/50 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 188.000.000
2. Tanah Seluas 175 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 209.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/50 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 779.000.000
4. Tanah Seluas 140 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 157.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m²/45 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 959.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 55.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 25.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 86.700.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.459.200.000

III. HUTANG

Rp. 180.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.279.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.